

KESIAPAN TENAGA KERJA BALI DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS^{*)}

MADE ANTARA

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana

Email: antara_unud@yahoo.com

ABSTRACT

Employment is one of the economic indicators that show the situation and socio-economic conditions of a region. The high unemployment rate shows the narrowness of employment opportunities caused by not develop of regional economic. Conversely, the low unemployment showed developing of economic activity in that region, because it can create employment opportunities. Therefore, policies that lead to the creation of employment opportunities should be taken by the executive of a region.

Over the last four years (2007-2010), labor force, not the labor force and population of work absolutely tend to increase parallel with the increasing of the total population of Bali and the work age population (over 15 years). Meanwhile, unemployment tends to decline. This is caused by an increase of the work age population are accommodated by the developing of the tourism service sector and the informal sector.

Proportion of the Bali labor force that works sectorally shifts significantly over the last four years (2007-2010), especially the labor force who work on agriculture declined, and labor force who work on social service sector, social and individual increase. In the same period, absolutely number of population who work in the formal and the informal sector increased, but relatively people who work in the formal sector declined, which is compensated by an increasing the population working in the informal sector. There was a drastic increase of Bali labor power placement to abroad over the last three years (2008-2010). This indicates that the interest of workers in Bali, especially young workers to work abroad is huge.

Tourism in Bali has become the engine creator of employment opportunities significantly. Increased tourist arrivals who accompanied increased of tourist spending, the more increased (demand) several of output produce by economy sectors, ultimately creating more employment opportunities.

Labor force of Bali Provincial, particularly labor force graduate from Tourism Vocational High School, Diploma I, II, III, or IV of Tourism which dominates of the Balinese young labor force are very ready to compete in the era of free trade to meet the demand of professional manpower from abroad.

Keywords: employment, ready compete, free trade area.

PENDAHULUAN

Perdagangan bebas (*free trade*) adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS) dengan ketentuan dari *World Customs Organization* yang berpusat di Brussels, Belgium, bahwa penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individu-individu dan antar perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor-impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan inilah yang ditolak

oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

Liberalisasi pasar artinya proses menuju pasar besar, di mana setiap orang, pengusaha, lembaga pemasar atau negara boleh memasarkan produk barang dan jasa yang dihasilkan dari satu negara ke negara lain tanpa ada hambatan, baik berupa hambatan tarif atau non tarif sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian dagang antara dua negara, antara beberapa negara dalam satu blok perdagangan (misal, AFTA, APEC, NAFTA) atau antar banyak negara dalam organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*, WTO). Menurut Hoekman (2002), lima prinsip penting dalam pemahaman pre-1994

^{*)} Makalah telah dipresentasikan pada Lokakarya 'Pembinaan Sumber Daya Manusia' yang Diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Informasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI., 3 Mei 2011 di Kuta-Bali.

GATT dan WTO, yaitu *non discrimination, reciprocity, enforceable, commitments, transparency, and safety values*.

Namun perlu diingat bahwa rezim pasar liberal masih menimbulkan pro-kontra antara kelompok-kelompok masyarakat di dunia. Kelompok pro pasar liberal dimotori oleh negara-negara industri maju (G-7àG-20) dan yang kontra dimotori oleh beberapa pemimpin negara sedang berkembang seperti Brazilia, masyarakat kritis dan LSM-LSM internasional. Pasar liberal tidak hanya belum terbukti mampu memakmurkan penduduk dunia, tetapi juga telah mulai tampak menimbulkan keresahan negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia.

Sebuah buku laris tulisan Thomas Friedman yaitu 'The Lexus and the Olive Tree' tahun 1999. Buku itu pada intinya menguraikan bahwa penduduk seluruh dunia akan makmur kalau semua negara di dunia ini mau saling membuka perbatasannya melakukan **liberalisasi pasar**. Barang-barang dapat keluar dan masuk dengan bebas, begitu juga investasi. Perdagangan dan investasi internasional juga akan membawa perdamaian dunia. Negara-negara memilih untuk tidak berperang karena ekonomi mereka terkait satu sama lain. Dengan amat provokatif, Friedman mengatakan bahwa **free trade plus free market** menghasilkan **kemakmuran plus perdamaian**.

Apa yang diterangkan Friedman sesungguhnya berdasarkan sebuah teori, yaitu teori liberal. Teori liberal dapat dikatakan teori yang paling optimistik mengenai terciptanya kemakmuran dunia. Mereka berpendapat bahwa struktur pasar liberal saat ini akan dapat membawa kemakmuran yang dicita-citakan. Dunia memang terbagi antara "negara-negara berkembang" dan "negara sedang berkembang". Meski demikian, di antara keduanya tidak perlu terjadi antagonisme. Keduanya dapat bekerja sama untuk menciptakan kemakmuran dunia.

Walau kelompok liberal optimistik terhadap keberhasilan pasar liberal dalam menciptakan kemakmuran masyarakat global, tetapi tidak luput dari kritik kelompok marxis. **Teori marxis** mengambil posisi yang berseberangan mengenai sistem pasar liberal. **Sistem kapitalis internasional dipercayai oleh para marxis tidak akan menghasilkan distribusi yang merata**. Negara-negara sedang berkembang itu miskin karena sejarah menempatkan mereka pada posisi subordinate dan kondisi ini bertahan terus sejauh mereka menjadi bagian dari sistem kapitalis internasional itu. Sistem pasar liberal pada dasarnya ada di bawah kendali negara-negara maju dan karena itu cara kerjanya menimbulkan kerusakan pada negara sedang berkembang. Atau secara kasar dikatakan bahwa operasi pasar liberal memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi kekayaan ekonomi dari negara yang sedang berkembang.

Teori lain yang juga mengkritik teori liberal adalah **teori strukturalis**, yang berpendapat bahwa struktur

pasar internasional melanggengkan keterbelakangan dan ketergantungan, dan pada akhirnya mendorong ketergantungan negara sedang berkembang kepada negara berkembang. Sebagai seorang strukturalis, Gunnar Myrdal mengatakan bahwa pasar cenderung untuk menyukai kelompok orang atau negara yang telah memiliki sumber kekayaan. Sebaliknya, pasar akan mengempaskan yang belum berkembang. Perdagangan internasional yang tidak beraturan dan juga gerakan modal yang bebas akan memperparah ketimpangan internasional. Pasar internasional yang berat sebelah seperti ini, menurut kelompok strukturalis, bertumpu pada ketimpangan yang ada dalam perdagangan internasional. Perdagangan tidak bekerja sebagai mesin pertumbuhan, tetapi malah memperlebar jurang antara negara berkembang dan negara sedang berkembang. **Pertama**, ini terjadi karena *terms of trade* yang merosot terhadap negara sedang berkembang. Permintaan akan ekspor produk primer yang berasal dari negara berkembang tidaklah elastik, kecuali itu kompetisi pasar internasional menyebabkan harga dari produk-produk itu semakin murah. **Kedua**, struktur monopoli negara-negara berkembang dan meningkatnya permintaan akan barang-barang jadi menyebabkan naiknya harga produk industri dari negara berkembang. Jadi, dalam kondisi pasar yang normal, perdagangan internasional sebenarnya memindahkan pendapatan dari negara sedang berkembang (selatan) ke negara berkembang (utara).

Jika ditelusuri lebih jauh, Indonesia telah berkomitmen dan ikutserta setidaknya dalam tujuh jenis liberalisasi perdagangan, yaitu: (1) Common Effective Preferential Tariff (CEPT), (2) ASEAN Free Trade Area (AFTA), (3) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yaitu kerjasama ekonomi Asia Pasifik, bahkan sebagai tuan rumah APEC tahun 1994, Indonesia malah menghasilkan deklarasi Bogor, (4) ASEAN Economic Community (AEC) yaitu menuju pasar tunggal ASEAN dengan target realisasi tahun 2015, (5) perjanjian 20 negara yaitu sepakat mencegah proteksionisme (G-20), (6) Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTAC), yaitu perluasan AFTA dari sekedar di antara sesama negara-negara ASEAN menjadi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA), (7) World Trade Organisation (WTO), yaitu organisasi perdagangan dunia, diratifikasi tanggal 1 Januari 1995, baru akan berlaku efektif pada tahun 2020.

Meningkatnya liberalisasi perdagangan dan perekonomian negara-negara ASEAN akan membawa kesempatan dan tantangan bagi dunia usaha Indonesia. Kendati ekspor dan impor barang serta jasa mencatat penurunan dua angka pada 2009 (ekspor menurun menjadi 11,4 persen dan impor 19,5 persen berdasarkan perkiraan tahun ke tahun), perdagangan internasional telah kembali stabil pada 2010 di Indonesia. Kecenderungan ini, tentunya, akan membawa dampak terhadap lapangan kerja dan kondisi kerja di Indonesia. Banyak pekerjaan formal baru akan tercipta di sektor ekspor, kendati sejumlah

pekerjaan di sejumlah sektor yang tidak kompetitif akan menghilang. Karenanya, kesadaran dan pemahaman yang memadai mengenai dampak ini menjadi penting dalam menyusun strategi ketenagakerjaan nasional yang efektif dalam dunia yang global saat ini.

Liberalisasi perdagangan di satu sisi dapat dipandang sebagai penciptaan lapangan kerja, tetapi di sisi lain juga dapat menghilangkan lapangan kerja lainnya. Karenanya, penting untuk menentukan di mana peluang penciptaan lapangan kerja dan di mana kerentanan muncul. Untuk itu, selain mengembangkan keterampilan untuk sektor ekspor yang terus meningkat, juga penting memastikan kebijakan tenaga kerja dan sosial melindungi mereka yang terkena imbas liberalisasi perdagangan.

Era perdagangan bebas dengan meratifikasi Asean Free Trade Agreement (AFTA) dan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) memungkinkan pertukaran bebas antarnegara termasuk tenaga kerja. Pertukaran tenaga kerja ini yang mengharuskan Indonesia meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar tidak kalah dengan negara lain. Penempatan tenaga kerja secara manusiawi dibutuhkan banyak prasyarat, antara lain, keterampilan tenaga kerja yang memadai, tempat dan bidang pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan serta perjanjian yang adil, dan penghasilan yang memadai.

Kalangan ekonom, misalnya ekonomi Sri Adiningsih dari UGM (dalam Anonim, 2009) memperkirakan perdagangan bebas ASEAN Cina (ACFTA) per 1 Januari 2010 akan membuat banyak industri nasional gulung tikar karena kalah bersaing. Ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih (dalam Anonim, 2009) berpendapat, dalam jangka pendek perdagangan bebas ASEAN-Cina ini lebih banyak mengindikasikan kerugian dibanding keuntungan. Perdagangan bebas akan mempercepat proses deindustrialisasi dan mempersempit kesempatan kerja. Kesepakatan perdagangan bebas yang telah dilakukan sejak delapan tahun lalu itu malah akan memperburuk sektor manufaktur. Sejak diimplementasikan awal 2010, kesepakatan itu mulai menuai masalah yang mengkhawatirkan. Sepekan terakhir tujuh instansi baru mulai menghitung kemungkinan daya tahan industri manufaktur Indonesia. Dari faktor kerugian, dalam jangka pendek perdagangan bebas itu akan membuat perusahaan yang tidak efisien bangkrut. Akibat barang impor menjadi lebih murah, volume impor barang konsumsi naik, sehingga menghabiskan devisa dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sulit menguat. Perusahaan juga cenderung akan menahan biaya produksi melalui penghematan penggunaan tenaga kerja tetap, sehingga *job security* tenaga kerja menjadi rapuh dan angka pengangguran diperkirakan meningkat. Diperkirakan, dalam jangka pendek perdagangan bebas itu bisa membuat angka pengangguran membengkak lagi ke level di atas 9,5 persen jika sekitar 700 jenis produk terpaksa “hilang” karena kalah bersaing oleh produk Cina.

Padahal sektor industri merupakan sektor kedua terbesar setelah pertanian dalam penyerapan tenaga kerja. Situasi ketenagakerjaan ini tampaknya akan menjadi penyakit kronis yang bisa merapuhkan fundamental ekonomi Indonesia. Perdagangan bebas akan menjadi masalah baru dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam jangka pendek, tampaknya Indonesia akan mengalami neto negatif yang tidak hanya merugikan sektor industri dan ketenagakerjaan, tapi juga penerimaan negara dari pajak. Mengantisipasi kekhawatiran kedua ekonomi UGM dan UI tersebut, pemerintah harus menyiapkan industri domestik agar bisa lebih kompetitif dengan produk Cina serta memberikan kemudahan dalam bentuk pendanaan atau lainnya.

PENAWARAN TENAGA KERJA DI PROVINSI BALI

Kondisi Aktual Tenaga Kerja Provinsi Bali

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan situasi dan kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Misal, tingginya tingkat pengangguran menunjukkan sempitnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh tidak berkembangnya perekonomian daerah tersebut. Jika tidak diusahakan menciptakan kesempatan kerja, maka kemungkinan akan muncul gejolak sosial di masyarakat yang dipicu oleh para penganggur. Sebaliknya, rendahnya pengangguran menunjukkan berkembangnya aktivitas perekonomian di daerah ybs, karena mampu menciptakan kesempatan kerja. Oleh karena itu, kebijakan yang mengarah pada penciptaan kesempatan kerja harus diambil oleh penguasa suatu daerah.

Pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Bali diarahkan pada pembentukan tenaga kerja profesional yang mandiri dan beretos kerja produktif, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Untuk mendukung harapan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menggariskan beberapa kebijakan ketenagakerjaan (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Bali Tahun 2003-2008), yaitu: (1) Meningkatkan sistim pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; (2) Meningkatkan penempatan tenaga kerja, mendorong perluasan kesempatan kerja dan berusaha, informasi dan perencanaan; (3) Mendorong peningkatan kualitas persyaratan kerja, fungsi kelembagaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja; (4) Meningkatkan sarana, prasarana kuantitas dan kualitas aparatur. Kebijakan ini telah dijabarkan menjadi program dan kegiatan, yaitu: Program perluasan dan pengembangan penempatan kerja dengan kegiatan: (a) meningkatkan pelaksanaan padat karya, (b) meningkatkan produktivitas penyandang masalah sosial, (c) memperluas kesempatan kerja. Program pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga

kerja dengan kegiatan: (a) mengembangkan hubungan industrial, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, (b) menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial/PHK, dan (c) mengembangkan hygiene dan kesehatan tenaga kerja. Program penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja, dengan kegiatan (a) mendayagunakan tenaga kerja, dan (b) merencanakan, dan menyebarluaskan ketenagakerjaan. Program pembinaan dan pengembangan produktivitas, dengan kegiatan (a) mengembangkan produktivitas tenaga kerja, dan (b) mengembangkan efektivitas lembaga kerjasama.

Total penduduk Bali yang berumur 15 tahun ke atas selama empat tahun terakhir (2007-2011) cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 2.661.913 jiwa, dan pada tahun 2010 sebanyak 2.748.117 jiwa, atau selama empat tahun meningkat sebanyak 115.156 jiwa, atau setiap tahun meningkat sebanyak 28.789 jiwa. Total penduduk berumur 15 tahun ke atas terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, dengan proporsi pada tahun 2007 yaitu 77 persen : 23 persen, dan tahun 2010 yaitu 77 persen : 23 persen. Jadi proporsinya relatif tetap selama empat tahun terakhir. Angkatan kerja di Provinsi Bali selama empat tahun terakhir (2007-2010) berdasarkan Sarkenast, cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 2.059.711 jiwa, dan pada tahun 2010 sebanyak 2.116.972 jiwa, atau selama empat tahun terakhir meningkat sebanyak 59.203 jiwa, atau setiap tahun meningkat sebanyak 14.801 jiwa. Bukan angkatan kerja di Provinsi Bali selama empat tahun terakhir (2007-2011) meningkat sedikit, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 602.202 jiwa, dan pada tahun 2010 sebanyak 631.145 jiwa, atau selama empat tahun meningkat sebanyak 28.943 jiwa, atau setiap tahun meningkat sebanyak 7.236 jiwa (tabel 1).

Angkatan kerja terdiri atas bekerja dan pengangguran, pada tahun 2007 proporsinya yaitu 96 persen : 4 persen, dan pada tahun 2010 proporsinya relatif tidak berubah yaitu tetap 96 persen : 4 persen. Penduduk bekerja di Provinsi Bali selama empat tahun terakhir (2007-2010) cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 1.982.134 jiwa, dan pada tahun 2011 sebanyak 2.041.337 jiwa, atau selama empat tahun meningkat sebanyak 59.203 jiwa, atau setiap tahun meningkat sebanyak 14.801 jiwa. Pengangguran di Provinsi Bali selama empat tahun terakhir (2007-2011) cenderung turun, pada tahun 2007 sebanyak 77.577 jiwa, dan pada tahun 2010 sebanyak 75.635 jiwa, atau selama empat tahun menurun sebanyak 1.942 jiwa, atau setiap tahun menurun sebanyak 4.855 jiwa (tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja di Provinsi Bali semakin berkembang terutama di sektor jasa pariwisata dan sektor informal. Sektor jasa pariwisata kembali menggeliat pasca bom Bali II tahun 2005, yang diiringi dengan perkembangan sector informal untuk melayani para pekerja di sektor pariwisata.

Bukan angkatan kerja yang terdiri atas: (1) sekolah, (2) mengurus rumah tangga, dan (3) lainnya, pada tahun

2007 proporsinya yaitu 31 persen : 52 persen : 17 persen, dan pada tahun 2010 proporsinya menjadi 30 persen : 53 persen : 17 persen (Tabel 2). Jadi selama empat tahun ada pergeseran sebesar 1 persen dari usia sekolah menjadi mengurus rumah tangga. Artinya pertumbuhan penduduk yang mengurus rumah tangga lebih tinggi dari pada penduduk pertumbuhan penduduk usia sekolah, sehingga akhirnya dalam persentase terhadap total penduduk mengurus rumahtangga lebih besar 1 persen daripada penduduk usia sekolah. Padahal secara riil, kedua jenis penduduk ini selama empat tahun terakhir sama-sama mengalami peningkatan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio antara Angkatan Kerja dan Total penduduk berumur 15 tahun ke atas, pada tahun 2007 sebesar 76,34 persen, dan pada tahun 2010 sebesar 77,03, atau selama empat tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara pengangguran dan angkatan kerja, pada tahun 2007 sebesar 3,77, dan pada tahun 2010 sebesar 3,13 (tabel 1). Jadi selama empat tahun terakhir, TPT menurun sebesar 0,64 persen, yang disebabkan oleh penduduk menganggur yang menurun, walau angkatan kerja meningkat.

Jadi berdasarkan uraian sebelumnya yang mengacu pada Tabel 1, selama empat tahun terakhir (2007-2010), angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dan penduduk bekerja secara riil cenderung meningkat paralel dengan peningkatan total penduduk Bali dan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Sedangkan, pengangguran cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penduduk usia kerja ditampung oleh perkembangan sektor jasa pariwisata dan sektor informal.

Tabel 1 Profil Penduduk Berumur 15 Tahun Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Bali, 2007-2010

Jenis Kegiatan	2007	2008	2009	2010
Bekerja	1.982.134	2.029.730	2.057.118	2.041.337
Pengangguran	77.577	69.548	66.470	75.635
Angkatan Kerja	2.059.711	2.099.278	2.123.588	2.116.972
Sekolah	185.590	160.679	187.161	192.158
Mengurus Rumah Tangga	311.996	335.419	319.205	333.115
Lainnya	104.616	100.760	98.793	105.872
Bukan Angkatan Kerja	602.202	596.858	605.159	631.145
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77,38	77,86	77,82	77,03
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,77	3,31	3,13	3,13
Total Penduduk Berumur 15 tahun ke atas	2.661.913	2.696.136	2.728.747	2.748.117
Total Penduduk Berumur 15 Tahun ke bawah				1.177.383
Total Penduduk Bali				

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2011 (Sakernas 2007-2010)
Catatan: Data tercatat pada Agustus tahun ybs.

Ketenagakerjaan Spesifik Provinsi Bali

Penduduk yang bekerja dapat dikelompokkan berdasarkan status pekerjaan utama seperti disajikan pada tabel

2. Dari sebanyak 1.982.134 jiwa bekerja pada tahun 2007, sebanyak 639.778 jiwa (32,28 persen) berstatus 'buruh/karyawan/pegawai', sebanyak 412.294 jiwa (20,80 persen) berstatus 'berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar', sebanyak 365.246 jiwa (18,43 persen) berstatus 'pekerja keluarga/tak dibayar', sebanyak 354.175 jiwa (17,87 persen) berstatus 'berusaha sendiri', dan tersedikit 55.857 jiwa (2,82 persen) berstatus 'berusaha dibantu buruh tetap'.

Dari sebanyak 2.041.337 jiwa bekerja pada tahun 2010, sebanyak 639.322 jiwa (31,32 persen) berstatus 'buruh/karyawan/pegawai', sebanyak 434.947 jiwa (21,31 persen) berstatus 'berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar', sebanyak 421.004 jiwa (20,62 persen) berstatus 'pekerja keluarga/tak dibayar', sebanyak 326.937 jiwa (16,02 persen) berstatus 'berusaha sendiri', dan tersedikit 37.543 jiwa (1,84 persen) berstatus 'pekerja bebas di pertanian'.

Selama kurun waktu empat tahun, terjadi pergeseran status pekerjaan yang signifikan, yaitu penduduk bekerja berstatus 'berusaha sendiri' menurun dari 354.175 jiwa (17,87 persen) pada tahun 2007 menjadi 326.937 jiwa (16,02 persen) pada tahun 2010, atau setiap tahun menurun sebanyak 6.810 jiwa. Penduduk bekerja berstatus 'berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar' meningkat dari sebanyak 412.294 jiwa (20,80 persen) pada tahun 2007 menjadi 434.947 (21,31 persen) pada tahun 2010, atau setiap tahun meningkat sebanyak 5.663 jiwa. Penduduk bekerja berstatus 'pekerja bebas di pertanian' menurun dari 62.670 jiwa (3,16 persen) pada tahun 2007 menjadi 37.543 jiwa (1,84 persen) pada tahun 2010, atau setiap tahun menurun sebanyak 6.282 jiwa. Penduduk bekerja berstatus 'pekerja bebas di non pertanian' meningkat dari 92.114 jiwa (4,65 persen) pada tahun 2007 menjadi 126.693 jiwa (6,21 persen), atau setiap tahun meningkat sebanyak 8.645 jiwa. Penduduk yang bekerja berstatus 'pekerja keluarga/tidak dibayar' meningkat dari 365.246 jiwa (18,43 persen) pada tahun 2007 menjadi 421.004 jiwa (20,62 persen) pada tahun 2010, atau setiap tahun meningkat sebanyak 13.940 jiwa.

Jadi secara umum proporsi penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama mengalami pergeseran. Penurunan penduduk bekerja berstatus 'berusaha sendiri', 'berusaha dibantu buruh tetap', 'buruh/karyawan/pegawai', dan 'pekerja bebas di pertanian', diikuti oleh peningkatan penduduk bekerja berstatus 'berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar', 'pekerja bebas di non pertanian', dan 'pekerja keluarga/ tidak dibayar'. Status pekerjaan yang bersifat mandiri semakin menurun, sedangkan usaha-usaha yang bersifat menyerap tenaga kerja semakin meningkat. Ini mengindikasikan bahwa usaha-usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Bali semakin berkembang yang membutuhkan tambahan tenaga kerja dari orang luar keluarga.

Tabel 2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Bali, 2007--2010

Status Pekerjaan Utama	2007	2008	2009	2010
Berusaha Sendiri	354.175	327.445	387.377	326.937
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar	412.294	488.184	439.243	434.947
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	55.857	50.839	59.588	54.891
Buruh/Karyawan/Pegawai	639.778	597.034	595.301	639.322
Pekerja Bebas di Pertanian	62.670	56.774	71.683	37.543
Pekerja Bebas di Non Pertanian	92.114	119.913	113.610	126.693
Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	365.246	389.541	390.316	421.004
T o t a l	1.982.134	2.029.730	2.057.118	2.041.337

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2011 (Sakernas 2007--2010)

Penduduk yang bekerja dapat pula dikelompokkan berdasarkan status pekerjaan formal dan informal seperti disajikan pada Tabel 3. Penduduk di Provinsi Bali yang bekerja sebanyak 1.982.134 jiwa pada tahun 2007, sebanyak 695.635 jiwa (35,10 persen) bekerja di sektor formal dan sebanyak 1.254.204 jiwa (65,61 persen) bekerja pada sector informal. Sedangkan penduduk di Provinsi Bali yang bekerja sebanyak 2.041.337 jiwa pada tahun 2010, sebanyak 694.213 jiwa (34,01 persen) bekerja di sektor formal dan sebanyak 1.347.124 jiwa (65,99 persen) bekerja pada sector informal.

Perkembangan penduduk bekerja berdasarkan status formal dan informal, selama empat tahun terakhir (2007-2010) secara riil baik yang bekerja pada sektor formal maupun sektor informal mengalami peningkatan. Akan tetapi secara persentase penduduk yang bekerja pada sektor formal mengalami penurunan sedikit, yang dikompensasi oleh peningkatan penduduk bekerja pada sektor informal. Ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk yang masuk menjadi angkatan kerja bekerja di sector formal atau bekerja sendiri tanpa menggantungkan mata pencahariannya pada jiwa atau lembaga lain, dan sering sector ini mempekerjakan beberapa pekerja luar keluarga. Fakta ini tampaknya selaras dengan fakta pada Tabel 3, yakni di Provinsi Bali semakin berkembang sektor mikro dan kecil yang bersifat informal, yang mempekerjakan orang lain yang berasal dari luar keluarga.

Tabel 3 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Formal dan Informal di Provinsi Bali, 2007--2010

Status Formal dan Informal	2007	2008	2009	2010
Sektor Formal	695.635 (35,10 %)	647.873 (31,92 %)	654.889 (31,84 %)	694.213 (34,01%)
Pertumbuhan Sektor Formal	3,54	-6,87	1,08	6,00
Sektor Informal				
Pertumbuhan Sektor Informal	7,35	7,41	1,47	-3,93
T o t a l				

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2011 (Sakernas 2007--2010)

Di luar jumlah tenaga kerja yang diminta oleh sektor-sektor perekonomian Provinsi Bali, masih ada sebanyak 75.635 jiwa penganggur tahun 2010 yang bergentayangan

kesana-kemari berusaha mencari pekerjaan. Belum lagi terhitung bukan angkatan kerja yang masuk menjadi angkatan kerja, terutama para lulusan SMK, sehingga memperpanjang barisan pengangguran di Bali. Dari catatan Bidang Penempatan Disnakertran Provinsi Bali, sampai Februari 2011 tercatat 30.044 jiwa yang mencari pekerjaan, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 15.402 jiwa (51 persen) dan perempuan sebanyak 14.642 jiwa (49,00 persen)(Tabel 4). Ini mengindikasikan bahwa walau tampak dari luar bahwa sector jasa pariwisata mampu menyerap tenaga kerja relatif banyak, tetapi pengangguran dan pencari kerja di Bali masih banyak.

Tabel 4 Pencari Kerja di Provinsi Bali Sampai dengan Bulan Februari 2011

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)	Persen
1	Laki-Laki	15.402	51,00
2	Perempuan	14.642	49,00
Jumlah		30.044	100,00

Sumber: Bidang Penempatan, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali.
Catatan: Pencari pekerja yang terdaftar di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sampai dengan Bulan Februari 2011.

Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja pada Sektor-Sektor Potensial di Provinsi Bali

BNSP yang merupakan singkatan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Badan ini bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi. Kemudian UU No 13 Tahun 2003 ini dijabarkan dalam bentuk PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dari informasih staf Disnakertran Provinsi Bali, ada sekitar 400-an jenis profesi yang harus disertifikasi kompetensinya. Akan tetapi, profesi yang baru disertifikasi di Provinsi Bali adalah hanya profesi pariwisata, yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Indonesia yang disingkat dengan LSP Parindo. Berdasarkan laporan LSP Parindo Provinsi Bali, jenis dan jumlah jiwa di profesi pariwisata yang telah tersertifikasi sampai akhir tahun 2010 seperti disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 tampak bahwa jenis profesi di profesi pariwisata yang telah tersertifikasi adalah profesi *tour guide* sebanyak 300 jiwa (21 persen) dan tersedikit adalah profesi produk atau *kitchen* sebanyak 99 jiwa (7 persen). Namun seiring dengan timbulnya kesadaran pentingnya sertifikasi profesi bagi tenaga kerja di pariwisata, maka cepat atau lambat minat tenaga kerja pariwisata mengikuti ujian sertifikasi kompetensi profesi akan semakin meningkat seiring dengan persyaratan yang dituntut oleh organisasi profesinya untuk menjadi anggota.

Tabel 5 Jenis dan Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi di Provinsi Bali Sampai Akhir Tahun 2010

No	Jenis Profesi Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi (Jiwa)	Persen
1	Front Offices	277	
2	Tata Hidangan	269	
3	Housekeeping (Room Attendent)	281	
4	Product (Kitchen)	99	
5	Tour Guide	300	
6	SPA Theraphist	200	
Total		1.426	

Sumber: LSP Parindo Provinsi Bali (2011)

PERMINTAAN TENAGA KERJA DI PROVINSI BALI

Permintaan Spesifik Tenaga Kerja oleh Sektor-Sektor Potensial di Provinsi Bali dan Forum Perundingan Perdagangan Bebas

Guna melihat kemampuan suatu sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, terjadinya transformasi struktural dalam penyerapan tenaga kerja, dan sekaligus sebagai tolok ukur kemajuan perekonomian suatu daerah, dapat dilihat melalui pendekatan distribusi tenaga kerja sektoral. Tahapan perekonomian suatu negara dari tradisional menjadi berbasis industri, salah satunya ditandai oleh adanya transformasi sektoral tenaga kerja dari sektor primer (pertanian) dengan kecenderungan produktivitas yang rendah, ke sektor-sektor dengan produktivitas tinggi yaitu sektor sekunder (manufaktur) dan sektor tersier (jasa).

Penduduk bekerja pada suatu tahun juga dapat dipilah-pilah atau didistribusikan menurut sektor, karena dalam realitanya apapun jenis pekerjaan yang digeluti oleh individu penduduk dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari sembilan sektor ekonomi. Misal, aktivitas petani bertanam padi atau beternak ayam dapat dimasukkan ke dalam sektor pertanian. Penduduk yang bekerja di hotel dan penduduk yang melakukan aktivitas perdagangan dapat dikelompokkan ke dalam sektor perdagangan dan jasa akomodasi, dsb. Penyebaran penduduk yang bekerja atau permintaan tenaga kerja oleh sektor-sektor perekonomian harus sebesar total penduduk yang bekerja. Perubahan distribusi permintaan atau penyerapan tenaga kerja oleh sektor-sektor sebagai petunjuk ada tidak transformasi struktural ketenagakerjaan dalam perekonomian di suatu daerah atau negara.

Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha Indonesia, semua aktivitas perekonomian dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam 9 sektor atau lapangan usaha seperti disajikan pada tabel 6. Dari sejumlah 1.911.693 jiwa penduduk yang bekerja pada tahun 2007, sebanyak 714.091 jiwa (36,03 persen) bekerja pada sector pertanian, baik sebagai petani (petani pemilik, petani penyakap, atau buruh tani), sebanyak 462.517 jiwa (23,54 persen) bekerja pada sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, sebanyak 289.108 jiwa (14,59 persen) bekerja

pada sektor industri, sebanyak 244.977 jiwa (12,36 persen) bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, dan tersedikit sebanyak 3.912 jiwa (0,19 persen) bekerja pada sector listrik, gas dan air minum.

Dari sebanyak 2.041.337 jiwa yang bekerja pada tahun 2010, sebanyak 673.928 jiwa (33,01 persen) bekerja pada sektor pertanian, sebanyak 472.840 jiwa (23,16 persen) bekerja pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, sebanyak 304.728 jiwa (14,93 persen) bekerja pada sektor industri, sebanyak 312.977 jiwa (15,33 persen) bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, dan tersedikit sebanyak 6.807 jiwa (0,33 persen) bekerja pada sektor industri pengolahan (tabel 6).

Proporsi penduduk Bali yang bekerja secara sektoral mengalami pergeseran selama empat tahun terakhir (2007--2010). Ini mengindikasikan adanya pergeseran permintaan tenaga kerja sektoral oleh sektor-sektor perekonomian di Bali. Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebanyak 714.091 jiwa (36,03 persen) pada tahun 2007 menurun menjadi 673.928 jiwa (33,01 persen) pada tahun 2010. Penurunan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian diiringi oleh peningkatan penduduk yang bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yaitu sebanyak 244.977 jiwa (12,36 persen) pada tahun 2007 meningkat menjadi 312.977 jiwa (15,33 persen) pada tahun 2010 (tabel 6). Jadi hanya pada dua sektor tampak pergeseran signifikan permintaan tenaga kerja sektoral, yaitu penurunan permintaan tenaga kerja oleh sektor pertanian, dan peningkatan permintaan tenaga kerja oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Tabel 6 Penduduk Berumur 15 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Bali, 2007--2010

Lapangan Pekerjaan Utama	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	714.091	726.287	704.282	673.928
2. Pertambangan dan Penggalian	8.544	12.180	8.156	7.150
3. Industri	289.108	263.331	293.853	304.728
4. Listrik, Gas dan Air Minum	3.912	7.760	6.838	6.807
5. Konstruksi	128.676	140.102	142.370	123.421
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	462.517	481.818	488.976	472.840
7. Transportasi, Perhubungan dan Komunikasi	77.373	92.742	85.991	86.399
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Keuangan	52.936	45.454	46.185	53.087
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	244.977	260.056	280.467	312.977
T o t a l	1.982.134	2.029.730	2.057.118	2.041.337

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2011 (Sakernas 2007--2010)

Memasuki forum perundingan perdagangan bebas, Bali yang merupakan bagian dari Indonesia yang telah

berkomitmen dan ikutserta setidaknya dalam tujuh jenis perjanjian dagang, tentunya akan menerima dampak positif dan negatif dari perdagangan bebas. Dampak negatifnya terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah semakin banyak masuk tenaga kerja asing ke Bali yang bekerja pada berbagai sektor. Namun, yang terbanyak bekerja pada aktivitas yang terkait dengan jasa kepariwisataan seperti perdagangan dan rumah makan 994 jiwa, hotel sebanyak 148 jiwa, dan pada sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi sebanyak 393 jiwa, dan sektor jasa-jasa lain sebanyak 91 jiwa (Tabel 7). Mereka ada yang bekerja pada perusahaan asing (PMA) dan ada juga bekerja pada perusahaan dalam negeri (PMDN) yang memang profesionalisme mereka dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa Bali juga lokasi yang menarik bekerja bagi tenaga kerja asing. Di samping itu, banyak juga orang asing mengais rejeki di Bali secara ilegal, yang bergerak dalam berbagai bidang kreativitas dan perdagangan luar negeri dengan memanfaatkan keterkenalan nama Bali di luar negeri. Jadi, perdagangan bebas produk dan jasa memiliki dua sisi, yaitu sisi positif berupa berkah bagi konsumen dan sekelompok orang tertentu, dan sisi negatif berupa bencana bagi produsen produk lokal atau sekelompok orang tertentu.

Tabel 7 Tenaga Kerja Asing Pendatang yang Mendapatkan Ijin Kerja Disnakertransduk Provinsi Bali Menurut Sektor sampai akhir 2008

No	Sektor	Jumlah (jiwa)
1	Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	9
2	Pertambangan dan Penggalian	-
3	Industri Pengolahan	66
4	Listrik, Gas dan Air Minum	-
5	Bangunan	4
6	Perdagangan dan Rumah Makan	994
7	Hotel	148
8	Angkutan dan Komunikasi	393
9	Keuangan, Asuransi dan Jasa Perusahaan	12
10	Jasa-Jasa lain	91
	Total	1.717

Sumber: Disnakertranduk (2008)

Sejak tahun 2008 sampai 2010, Disnakertrans Provinsi Bali telah mencatat penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri seperti disajikan pada Tabel 8, baik penempatan yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) maupun penempatan oleh perorangan. Pada Tabel 8 tampak bahwa total penempatan tenaga kerja Bali selama tiga tahun adalah sebanyak 5.382 jiwa, yang terdiri atas 827 jiwa AKL, 6 jiwa AKAD, 3.073 jiwa AKAN-PPTKIS dan 1.476 jiwa AKAN-Perorangan. Jadi tampak ada peningkatan penempatan setiap tahun, dari 173 jiwa tahun 2008 menjadi 290 jiwa tahun 2009, dan meningkat drastis sebanyak 4.919 jiwa tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya PPTKIS yang berdiri Bali, dan semakin meningkatnya minat tenaga kerja Bali terutama para profesional perhotelan dan pariwisata untuk bekerja di luar negeri, terutama di kapal pesiar asing

dan hotel-hotel di luar negeri seperti di Qatar, Maldeva, dll.

Tabel 8 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri di Provinsi Bali

Tahun	Jenis Penempatan				Jumlah
	Antar Kerja Lokal (AKL)	Antar Kerja Daerah (AKAD)	Antar Kerja Antar Negera (AKAN)		
			PPTKIS	Perorangan	
2008	167	6	-	-	173
2009	290	-	-	-	290
2010	370	-	3.073	1.476	4.919
Jumlah	827	6	3.073	1.476	5.382

Sumber: Bidang Penempatan, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali

Berdasarkan informasi Bidang Penempatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, jumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Bali yaitu sebanyak 28 unit yang terdiri dari Kantor Pusat 4 unit, dan Kantor Cabang 24 unit. Sedangkan PPTKIS yang memiliki Surat Izin Pengerahan (SIP) sebanyak lima buah, yaitu PT. Cemerlang Tunggal Inti Karsa, PT. Bali Paradise Citra Dewata, PT. Bali Duta Mandiri, PT. Satria Andi Persada, PT. Lawu Agung Rinjani, dan PT. Cipta Rejeki Utama.

Berdasarkan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, sejak tahun 2009, Pemerintah Provinsi Bali melalui Bank Pembangunan Daerah Bali menyediakan dana pinjaman bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bali yang akan bekerja di luar negeri. Dari rencana pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar) dengan bunga kredit 1 persen menurun tanpa jaminan, sampai Februari 2011 baru terealisasi sebesar Rp 1.537.000.000,00 atau sebesar 76,86 persen. Di tengah kesulitan pembiayaan bagi calon-calon TKI Bali yang akan berangkat kerja ke luar negeri, yang memang membutuhkan biaya awal relatif banyak, baik sebagai biaya persiapan keberangkatan maupun biaya perjalanan ke tempat kerja, Pemprov. Bali berinisiatif membuat program terobosan yang sangat membantu para calon TKI Bali yang akan berangkat kerja ke luar negeri. Dari kacamata penulis sebagai insan kampus, dana pinjaman tanpa agunan dengan bunga rendah adalah

suatu program yang bagus dan patut diberi apresiasi.

Umumnya usaha-usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang membutuhkan atau meminta tenaga kerja melapor ke setiap Disnaker kabupaten setempat. Berdasarkan hasil rekapan Disnakertran Provinsi Bali yang datanya bersumber dari Disnaker kabupaten, pada bulan Januari 2011, lowongan kerja yang tersedia secara sektoral di Provinsi Bali adalah sebanyak 949 jiwa yang terdiri dari 786 laki dan 163 perempuan. Empat sektor yang paling signifikan membutuhkan tenaga kerja pada Januari 2011 adalah sektor 'perdagangan, hotel dan rumah makan', sektor 'keuangan asuransi dan komunikasi', sektor 'listrik, gas dan air minum', dan sektor 'industri pengolahan' (tabel 9). Seiring dengan perkembangan perekonomian Bali ke depan yang digerakkan oleh jasa-jasa pariwisata, tampaknya pada empat sektor inilah lowongan atau kesempatan kerja akan bertambah.

Tampaknya Disnakertran di setiap kabupaten di Bali selain mewajibkan UMKM di wilayahnya melaporkan kebutuhan tenaga kerja, juga menyalurkan atau menempatkan tenaga kerja yang terdaftar. Sebagai ilustrasi, pada bulan Januari 2011, total pencari kerja yang ditempatkan adalah sebanyak 173 jiwa, yang terdiri dari 81 jiwa laki dan 92 perempuan (Tabel 10). Dari sejumlah ini, terbanyak yang ditempatkan adalah berpendidikan sarjana, kemudian disusul oleh pendidikan diploma, dan tersedikit adalah pendidikan SLTA.

Tabel 10 Penempatan Pencari Kerja Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Bulan Januari 2011 di Provinsi Bali

No	Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja yang Ditempatkan			Persen
		L	P	Jumlah	
1	Sekolah Dasar	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	0
3	SLTA	7	1	8	5
4	Diploma	15	8	23	13
5	Sarjana	59	83	142	82
Jumlah		81	92	173	100

Sumber : Disnaker Kabupaten Gianyar, Buleleng, Badung, Klungkung, Bangli, Karangsem, Denpasar (dalam Bidang Penempatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali).

Catatan: L = Laki; P=Perempuan

Tabel 9 Lowongan Kerja yang Terdaftar Dirinci Menurut Sektor/Lapangan Usaha di Provinsi Bali Bulan Januari 2011 di Provinsi Bali

Golongan Pokok Jabatan	Sisa bulan lalu		Terdaftar bulan ini		Penempatan bulan ini		Penghapusan bulan ini		Sisa akhir bulan ini	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	6	0	0	0	0	0	0	0	6
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Pengolahan	69	14	0	0	2	0	20	5	47	9
Listrik, Gas, dan Air Minum	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan	575	110	63	10	12	6	0	0	626	114
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
Keuangan, Asuransi, dan Usaha Persewaan	107	28	2	0	4	1	0	0	105	27
Jasa Masyarakat, Sosial, dan Perorangan	1	0	63	86	63	84	0	0	1	2
Jumlah	759	163	128	97	81	92	20	5	786	163

Sumber : Disnaker Kabupaten Gianyar, Buleleng, Badung, Klungkung, Bangli, Karangsem, Denpasar (dalam Bidang Penempatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali).

Catatan: L = Laki; P=Perempuan

Jika penempatan pencari kerja didasarkan atas golongan pokok jabatan, dari sebanyak 173 jiwa yang ditempatkan pada Januari 2011, ditempatkan terbanyak adalah tenaga profesional sebanyak 155 jiwa, dan tersedikit adalah tenaga usaha penjualan (Tabel 11). Sedangkan jika penempatan didasarkan atas Dinas Kota/Kab, maka Dinas/Kota yang menempatkan terbanyak adalah Disnaker Kota Denpasar sebanyak 147 jiwa, disusul oleh Disnaker Kabupaten Karangasem, dan tersedikit adalah Disnaker Kabupaten Bangli (Tabel 12). Ini menunjukkan bahwa Disnaker-Dinsnaker kota/kabupaten dan Disnakertran Provinsi Bali sangat aktif dalam menempatkan tenaga kerja, yang berarti sangat aktif ikut mengatasi pengangguran dengan menjembatani antara dunia UMKM yang membutuhkan tenaga kerja dan para pencari kerja yang masih relatif awam ke mana harus mengajukan lamaran kerja.

Tabel 11 Penempatan Pencari Kerja Dirinci Menurut Golongan Pokok Jabatan Bulan Januari 2011 di Provinsi Bali

No	Golongan Pokok Jabatan	Pencari Kerja yang Ditempatkan			Persen
		L	P	Jumlah	
1	Tenaga Profesional	66	89	155	90
2	Tenaga Kepemimpinan dan Ketetalaksanaan	7	1	8	5
3	Pejabat Pelaksanaan, Tenaga Tata Usaha, Tenaga ybdi	3	2	5	3
4	Tenaga Usaha Penjualan	2	0	2	1
5	Tenaga Usaha Jasa	3	0	3	2
6	Tenaga Usaha Pertanian	0	0	0	0
7	Tenaga Produksi dan Tenaga jbdi	0	0	0	0
	Jumlah	81	92	173	100

Sumber: Disnaker Kabupaten Gianyar, Buleleng, Badung, Klungkung, Bangli, Karangsem, Denpasar (dalam Bidang Penempatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali).

Catatan: L = Laki; P=Perempuan

Permintaan Langsung Terhadap Tenaga Kerja dari Bali

Berdasarkan data terbaru dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, selama tiga bulan (Januari-Maret

2011), jumlah penempatan atau dengan kata lain pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang ditandai oleh penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) adalah sebanyak 2.827 jiwa (Tabel 13). Jika dirinci menurut jenis kelamin, yaitu laki-laki sebanyak 2373 jiwa (84 persen) dan perempuan sebanyak 454 jiwa (16 persen). Jika dirinci menurut daerah asal yaitu, Denpasar sebanyak 488 jiwa (17 persen), Buleleng sebanyak 455 jiwa (16 persen), Tabanan sebanyak 424 jiwa (15 persen), Badung sebanyak 303 jiwa (11 persen), Gianyar sebanyak 311 jiwa (11 persen), Klungkung sebanyak 218 jiwa (8 persen), Bangli 158 jiwa (6 persen), Karang Asem sebanyak 185 jiwa (6 persen), Jembrana sebanyak 138 (5 persen), dan luar bali sebanyak 154 jiwa (5 persen). Jika dirinci menurut sektor usaha atau pekerjaan, yaitu kapal pesiar sebanyak 2.294 jiwa (81 persen), Spa Therapist sebanyak 267 jiwa (9 persen), perkebunan sebanyak 130 jiwa (5 persen), perhotelan sebanyak 71 jiwa (2 persen), perikanan sebanyak 30 jiwa (1 persen), konstruksi 18 jiwa (1 persen), pertambangan sebanyak 16 jiwa (1 persen), dan kapal tanker sebanyak 1 jiwa (0,1 persen). Jika dirinci menurut pendidikan, yaitu diploma 1.777 jiwa (63 persen), SLTA sebanyak 855 jiwa (30 persen), sarjana sebanyak 90 jiwa (3 persen), SD sebanyak 53 jiwa (2 persen), dan SLTP sebanyak 52 (35). Jika penempatan TKI Bali di luar negeri dirinci menurut kawasan penempatan, yaitu Kawasan Asia Pasifik sebanyak 413 jiwa (15 persen), Kawasan Eropa 579 jiwa (20 persen), Kawasan Afrika sebanyak 46 jiwa (2 persen), Kawasan Amerika sebanyak 1.789 jiwa (63 persen). Jika dirinci menurut penempatan lima negara besar, yaitu Amerika Serikat sebanyak 1.645 jiwa, Italia sebanyak 280 jiwa, Brazil sebanyak 134, Selandia Baru sebanyak 123, dan Cyprus sebanyak 88 (Lima besar dari 45 negara penempatan). Sedangkan jika dirinci menurut PPTKIS/Mandiri, yaitu mandiri/perorangan sebanyak 2.694 jiwa (95 persen), PT. Bali Duta Mandiri sebanyak 86 jiwa (3 persen), PT Satria Abdi Persada sebanyak 45 jiwa (2 persen), dan PT Cipta Rezeki Utama sebanyak 2 jiwa (0,1 persen).

Tabel 12 Sisa Lowongan, Lowongan Terdaftar, Penempatan dan Jumlah Pencari Kerja Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Sampai Bulan Januari 2011

No	Dinas Kab/Kota	Sisa lowongan bulan ini			Lowongan yang terdaftar			Penempatan pemenuhan bulan ini			Jumlah pencari kerja		
		L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
1	Badung	98	17	115	0	2	2	2	1	3	2258	3241	5499
2	Denpasar	25	18	43	63	84	147	63	84	147	3414	3414	6831
3	Tabanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jembrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Buleleng	0	0	0	5	1	6	5	1	6	3180	2653	5833
6	Gianyar	471	52	523	0	0	0	0	0	0	645	836	1481
7	Klungkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16
8	Bangli	192	76	268	60	10	70	2	0	2	4559	3683	8242
9	Karangasem	0	0	0	0	0	0	9	6	15	1249	700	1949
	Jumlah	786	163	949	128	97	225	81	92	173	15319	14532	29851

Sumber: Disnaker Kabupaten Gianyar, Buleleng, Badung, Klungkung, Bangli, Karangsem, Denpasar (dalam Bidang Penempatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali).
Catatan: L = Laki; P=Perempuan

Tabel 13 Penempatan (Permintaan) TKI Bali di Luar Negeri Menurut Jenis Kelamin, Daerah Asal, Sektor Usaha, Pendidikan, dan Negara Penempatan Januari–Maret 2011

Menempatkan Menurut:	Jumlah
Jumlah Penempatan	2827 (Penerbitan KTKLN = 2827)
Jenis Kelamin	Laki-Laki = 2373 jiwa (84 persen); Perempuan = 454 jiwa (16 persen)
Daerah Asal	Denpasar = 488 jiwa (17 persen); Buleleng = 455 jiwa (16 persen); Tabanan = 424 jiwa (15 persen); Badung = 303 jiwa (11 persen); Gianyar 311 jiwa (11 persen); Klungkung = 218 jiwa (8 persen); Bangli = 158 jiwa (6 persen); Karang Asem = 185 jiwa (6 persen); Jembrana = 138 jiwa (5 persen); Luar Bali = 154 jiwa (5 persen)
Sektor Usaha	Kapal Pesiar = 2294 jiwa (81 persen); Spa Therapist = 267 jiwa (9 persen); Perkebunan = 130 jiwa (5 persen); Perhotelan = 71 jiwa (2 persen); Perikanan = 30 jiwa (1 persen); Konstruksi = 18 jiwa (1 persen); Pertambangan = 16 jiwa (1 persen); Kapal Tanker = 1 jiwa (0,1 persen)
Pendidikan TKI	Diploma = 1777 jiwa (63 persen); SLTA = 855 jiwa (30 persen); Sarjana = 90 jiwa (3 persen); SD = 53 jiwa (2 persen); SLTP = 52 jiwa (35)
Kawasan	Kawasan Asia Pasifik = 413 jiwa (15 persen); Kawasan Eropa = 579 jiwa (20 persen); Kawasan Afrika = 46 jiwa (2 persen); Kawasan Amerika = 1.789 jiwa (63 persen) (empat kawasan)
Negara Penempatan	Amerika Serikat = 1645 jiwa; Italia = 280 jiwa; Brazil = 134 jiwa; Selandia Baru = 123 jiwa; Cyprus = 88 jiwa (Lima besar dari 45 negara penempatan)
PPTKIS/ Mandiri	Mandiri /perorangan = 2694 jiwa (95 persen); PT. Bali Duta Mandiri = 86 jiwa (3 persen); PT Satria Abdi Persada = 45 jiwa (2 persen); PT Cipta Rezeki Utama = 2 jiwa (0,1 persen)

Sumber: BP3TKI Denpasar (Maret 2011)

Melihat minat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bali bekerja di luar negeri sangat besar, yang setiap harinya sangat banyak calon-calon TKI berurusan ke kantor BPTKI, maka BP3TKI telah mencoba membuat estimasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bali di luar negeri seperti disajikan pada Tabel 14. Pada Tabel 14 tampak bahwa sampai akhir 2011 diestimasi sebanyak 11.308 jiwa mampu ditempatkan di luar negeri. Dari jumlah ini, jenis pekerjaan yang diminati adalah bekerja di kapal pesiar sebanyak 9.176 jiwa, *SPA-Theraphist* sebanyak 1.068 jiwa, dan perkebunan sebanyak 520 jiwa. Jadi dapatlah dikatakan bahwa minat TKI Bali terutama tenaga kerja muda untuk bekerja di luar negeri sangat besar, semata-mata didasari oleh beberapa alasan, antara lain, tingkat upah di luar negeri lebih besar daripada di Bali sehingga bekerja dua tahun sudah mampu mengumpulkan modal, ingin mencari pengalaman di luar negeri, gengsi meningkat bekerja di luar negeri lebih-lebih keluarga TKI, lapangan kerja di Bali semakin sempit dan harus diperebutkan secara ketat, dll.

PARIWISATA PENCIPTA KESEMPATAN KERJA

Sejak tahun 1980-an kepariwisataan di Bali mulai berkembang dan tahun 1990-an mencapai perkembangan sangat pesat, sehingga Bali menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia dan menjadi daerah tujuan wisata utama di Indonesia serta daerah tujuan wisata terfavorit di dunia. Hal ini membawa dampak terhadap perekonomian Bali, baik secara mikro maupun makro.

Tabel 14 Estimasi Penempatan (Permintaan) TKI Bali di Luar Negeri Menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2011

Sektor	Januari-Maret 2011	Estimasi 2011	Persentase Estimasi
Kapal Pesiar	2.294	9.176	81.15
Perhotelan	71	284	2.51
SPA Therapist	267	1.068	9.44
Perkebunan	130	520	4.60
Perikanan	30	120	1.06
Pertambangan	16	64	0.57
Konstruksi	18	72	0.64
Kapal Tanker	1	4	0.04
Jumlah	2.827	11.308	100.00

Sumber: BP3TKI Denpasar (Maret 2011)

Perekonomian Bali yang didominasi oleh pariwisata mempunyai karakteristik yang unik dibandingkan dengan perekonomian provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pilar-pilar ekonomi yang dibangun lewat keunggulan industri pariwisata sebagai *leading sector*, telah membuka beragam peluang yang dapat mendorong aktivitas ekonomi serta pengembangan etos kerja masyarakat. Dimensi itu tergambar dari meluasnya kesempatan kerja, besarnya peluang peningkatan pendapatan masyarakat, luasnya jaringan pemasaran yang meliputi batas-batas lokal sampai tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Dengan dukungan industri pariwisata yang sangat besar telah menyebabkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung seperti perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa memberikan distribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Bali, dan penerimaan devisa bagi negara.

Peranan sektor pariwisata dalam perekonomian tidak hanya dari kontribusinya terhadap pembentukan nilai tambah bruto, tetapi juga dapat dilihat dari pengeluaran wisatawan untuk pembelian barang dan jasa selama berada di Bali. Pengeluaran wisatawan dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung merupakan akibat dari pembelian langsung wisatawan terhadap barang dan jasa yang tersedia di wilayah, di mana wisatawan tersebut melakukan perjalanan. Sedangkan dampak tidak langsung meliputi pembelian terhadap barang dan jasa oleh wisatawan di mana secara tidak langsung mempengaruhi sektor-sektor ekonomi yang memproduksi barang dan jasa tersebut baik produsen maupun penyediaannya/perdagangan seperti pedagang besar yang menjual barang ke pedagang eceran yang selanjutnya dibeli oleh wisatawan atau produsen yang menghasilkan barang/jasa yang barang dan jasanya dibeli oleh wisatawan melalui pedagang eceran dsb.

Jadi dari perspektif ekonomi, dampak positif pariwisata, yaitu (1) mendatangkan devisa bagi negara melalui penukaran mata uang asing di daerah tujuan wisata, (2) pasar potensial bagi produk barang dan jasa masyarakat setempat, (3) meningkatkan pendapatan masyarakat yang kegiatannya terkait langsung atau tidak langsung dengan jasa pariwisata, (4) memperluas penciptaan

kesempatan kerja, baik pada sektor-sektor yang terkait langsung seperti perhotelan, restoran, agen perjalanan, maupun pada sektor-sektor yang tidak terkait langsung seperti industri kerajinan, penyediaan produk-produk pertanian, atraksi budaya, bisnis eceran, jasa-jasa lain dan sebagainya, (5) sumber pendapatan asli daerah (PAD), dan (6) merangsang kreativitas seniman, baik seniman pengrajin industri kecil maupun seniman 'tabuh' dan tari yang diperuntukkan konsumsi wisatawan. .

Berdasarkan model *Tourism Satellite Account (TSA)* Bali 2007 yang dikonstruksi oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, maka dapat dihitung multiplier penciptaan kesempatan kerja pariwisata di Bali. Multiplier (*direct and indirect*) penciptaan kesempatan kerja adalah dampak langsung dan tidak langsung pariwisata terhadap penciptaan kesempatan kerja, yaitu sebesar 0,0000000283 di sektor pariwisata dan sebesar 0,00000006756 dalam perekonomian Bali. Artinya setiap tambahan pengeluaran wisatawan sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (1 triliun rupiah) akan mampu menciptakan kesempatan kerja di sector pariwisata sebanyak 28.300 jiwa dan dalam perekonomian Bali sebanyak 67.560 jiwa. Dengan demikian kontribusi penciptaan kesempatan kerja di pariwisata terhadap penciptaan kerja secara keseluruhan sebesar 41,89 persen (Antara dan Pitana, 2008)(Tabel 15).

Berdasarkan Tabel TSA Bali 2007, pengeluaran wisatawan total di Bali tahun 2007 yang terdiri atas pengeluaran wisman, pengeluaran wisnus, promosi dan investasi adalah sebesar Rp. 29.764.921.000.000,00. Pengeluaran sebesar ini dapat menimbulkan dampak penciptaan kesempatan kerja sebesar 843.347 jiwa di sector pariwisata dan dalam perekonomian Bali

sebanyak 2.010.918 jiwa. Jadi, tampak jelas bahwa untuk kasus pariwisata Bali, pariwisata telah menjadi mesin pencipta kesempatan kerja secara signifikan. Makin meningkat kunjungan wisatawan yang disertai makin meningkat pengeluaran wisatawan, maka makin meningkat (permintaan) berbagai macam *output* sektor-sektor ekonomi, pada akhirnya makin banyak menciptakan kesempatan kerja.

PENUTUP

1. Selama empat tahun terakhir (2007--2010), angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dan penduduk bekerja secara absolut cenderung meningkat paralel dengan peningkatan total penduduk Bali dan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Sebaliknya, pengangguran cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penduduk usia kerja ditampung oleh perkembangan sektor jasa pariwisata dan sektor informal.
2. Selama empat tahun terakhir (2007--2010), proporsi penduduk bali yang bekerja secara sektoral mengalami pergeseran. Pergeseran signifikan adalah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian menurun, dan tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan meningkat.
3. Selama empat tahun terakhir (2007--2010), secara absolut penduduk yang bekerja pada sektor formal dan informal meningkat. Akan tetapi secara relatif penduduk yang bekerja pada sektor formal menurun, yang dikompensasi oleh peningkatan penduduk bekerja pada sektor informal.
4. Selama tiga tahun terakhir (2008--2010) ada

Tabel 15 Dampak Pariwisata Terhadap Tenaga Kerja di Bali Tahun 2007 (jiwa)

No	Lapangan Usaha	Pengeluaran Wisatawan, Promosi & Investasi	Dampak				
			Output	NTB	Upah/gaji	Pajak	Tenaga-kerja
1	Pertanian	183.387	3.739.486	1.908.852	555.161	14.380	156.330
2	Penggalian	0	251.886	164.344	34.543	2.279	5.269
3	Industri Pengolahan	7.824.017	9.689.262	3.111.529	1.046.431	84.937	267.453
4	Listrik, Gas & Air	129	424.859	291.870	63.583	2.881	1.350
5	Konstruksi	3.099.750	3.606.608	1.242.262	746.445	13.168	85.214
7	Hotel	7.117.226	7.261.779	4.013.888	689.809	302.489	44.316
8	Restoran	4.394.856	4.905.611	2.205.040	511.925	108.267	64.773
9	Angkutan Darat	1.383.877	1.460.433	856.557	233.057	32.084	31.969
10	Angkutan Air	57.755	120.540	87.586	33.972	1.831	1.197
11	Angkutan Udara	1.917.095	2.396.901	1.393.089	57.990	22.746	941
12	Jasa Penunjang Angk	410.732	734.154	328.937	148.280	4.010	6.791
13	Komunikasi	810.955	1.020.854	659.913	140.416	11.006	9.324
14	Lembaga keuangan	140.820	1.157.614	743.001	142.221	4.983	13.679
15	Jasa dan lainnya	2.424.322	2.967.051	2.216.628	480.078	40.592	88.481
	Total Pariwisata	29.764.921	41.451.484	20.349.269	5.595.893	673.284	843.025
	Total Ekonomi	29.764.921	78.325.606	42.336.420	13.336.586	984.809	2.011.048
	Share Pariwisata (persen)	-	52,92	48,07	41,96	68,37	41,92

Sumber: Depbudpar (2007).

peningkatan drastis penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bali ke luar negeri. Ini mengindikasikan bahwa minat TKI Bali terutama tenaga kerja muda untuk bekerja di luar negeri sangat besar.

5. Pariwisata di Bali telah menjadi mesin pencipta kesempatan kerja secara signifikan. Makin meningkat kunjungan wisatawan yang disertai makin meningkat pengeluaran wisatawan, maka makin meningkat (permintaan) berbagai macam output sektor-sektor ekonomi, pada akhirnya makin banyak menciptakan kesempatan kerja.
6. Tenaga kerja Provinsi Bali, khususnya tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata, Diploma I, II, III, atau IV Pariwisata yang mendominasi angkatan kerja muda Bali sangat siap bersaing di era perdagangan bebas untuk memenuhi permintaan tenaga kerja profesional dari luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. *Pasar Bebas ASEAN-China Timbulkan Pengangguran*. Dalam Tempo Interaktif, Selasa, 22 Desember 2009.
- Antara, Made and IG. Pitana. 2009. *Tourism Labour Market in the Asia Pacific Region: The Case of Indonesia*. Paper Presented at the Fifth UNWTO International Conference on Tourism Statistics: Tourism an Engine for Employment Creation. Bali, Indonesia, 30 March--2 April 2009.
- BPS Provinsi Bali. 2011. *Sakernas 2007--2010*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Renon Denpasar.
- Depbudpar. 2007. *Bali Tourism Satellite Account 2007*. Ministry of Culture and Tourism, Republic of Indonesia.
- Disnakertransduk. 2008. *Profil Ketenagakerjaan Daerah Tahun 2008*. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Bali. Jalan Raya Puputan Nitimandala Renon Denpasar-Bali.
- Friedman, Thomas. 1999. *The Lexus and the Olive Tree*. FSG.
- Hoekman, Bernard. 2002. *Development, Trade, and the WTO*. Edited by Hoekman, Bernard; Aditya Mattoo, and Philip English. The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank. Washington, DC.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Bali Tahun 2003--2008.

UCAPAN TERIMA KASIH

Makalah ini tidak akan terwujud tanpa bantuan orang lain atau instansi lain, terutama dalam penyediaan data ketenagakerjaan terbaru. Untuk, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Didik Setyohadi, SST, M.Agb. dari BPS Provinsi Bali, Mas Abri Danar Prabawa dari BP3TKI Denpasar, Kabid Penempatan beserta Staf pada Disnakertran Provinsi Bali, dan Pimpinan beserta Staf LSP Parindo Provinsi Bali. Semoga kebaikan beliau-beliau tersebut memperoleh balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Penempatan TKI Bali di Luar Negeri Menurut Jenis Kelamin Januari--Maret Tahun 2011

Jenis Kelamin	Januari 2011 (Jiwa)	Februari 2011 (Jiwa)	Maret 2011 (Jiwa)	Jumlah Januari-Maret (Jiwa)	Persen
Laki-Laki	353	998	1.022	2.373	84
Perempuan	116	134	204	454	16
Jumlah	469	1.132	1.226	2.827	100

Sumber: BP3TKI Denpasar (Maret 2011)

Lampiran 2 Penempatan TKI Asal Bali Menurut Daerah Asal Januari--Maret Tahun 2011

NO.	Daerah Asal	Jumlah (Jiwa)	Persen
1	Denpasar (I)	488	17
2	Badung	303	11
3	Tabanan (III)	417	15
4	Jembrana	138	5
5	Buleleng (II)	455	16
6	Karangasem	185	6
7	Klungkung	218	8
8	Bangli	158	6
9	Gianyar	311	11
10	Luar Negeri	154	5
	Jumlah	2.827	100

Sumber: BP3TKI Denpasar (Maret 2011)

Lampiran 3 Penempatan (Permintaan) TKI Bali di Luar Negeri Menurut Sektor Pekerjaan Januari--Maret Tahun 2011

Sektor	Januari 2011 (Jiwa)	Februari 2011 (Jiwa)	Maret 2011 (Jiwa)	Jumlah Januari-Maret (Jiwa)	Persen
Kapal Pesiar	330	983	981	2294	81.15
Perhotelan	45	10	12	71	2.51
SPA Therapist	84	69	114	267	9.44
Perkebunan	10	47	73	130	4.60
Perikanan	0	10	20	30	1.06
Pertambangan	0	13	3	16	0.57
Konstruksi	0	0	18	18	0.64
Kapal Tanker	0	0	1	1	0.04
Jumlah	469	1.132	1.009	2.827	100.00

Sumber: BP3TKI Denpasar (Maret 2011)

Lampiran 4 Penempatan TKI Bali di Luar Negeri Menurut Jenis Pendidikan Januari--Maret Tahun 2011

Pendidikan	Januari 2011 (Jiwa)	Februari 2011 (Jiwa)	Maret 2011 (Jiwa)	Jumlah Januari-Maret (Jiwa)	Persen
SD	7	15	31	53	2
SLTP	9	17	26	52	2
SLTA	154	319	382	855	30
Diploma	280	750	747	1.777	63
Sarjana	19	31	40	90	3
Jumlah	469	1.132	1.226	2.827	2

Sumber: BP3TKI Denpasar (Maret 2011)

Lampiran 5 Penempatan TKI Asal Bali Menurut Empat Kawasan Januari--Maret Tahun 2011

No	Negara	Jumlah (Jiwa)
1	Kawasan Asia Pasifik	413
2	Kawasan Eropa	579
3	Kawasan Afrika	46
4	Kawasan Amerika	1.789
	Jumlah	2.827

Sumber: BP3TKI Denpasar (Maret 2011)

Lampiran 6 Penempatan TKI Bali di Luar Negeri Menurut PPTKIS/Mandiri Januari--Maret Tahun 2011

No	Penempatan	Januari 2011 (jiwa)	Februari 2011 (Jiwa)	Maret 2011 (Jiwa)	Jumlah	
					Januari- Maret 2011 (Jiwa)	Persen
1	PT Bali Duta Mandiri	7	3	76	86	3
2	PT Satria Abdi Persada	0	45	0	45	2
3	PT Cipta Rezeki Utama	0	2	0	2	0,1
4	Mandiri	462	1082	1150	2694	95
	Jumlah	469	1132	1226	2827	100

Sumber: BP3TKI Denpasar (Maret 2011)

Lampiran 7 Penempatan TKI Asal Bali Menurut Negara Penempatan di Luar Negeri Januari--Maret 2011

No	Kawasan Asia Pasifik		Kawasan Eropa		Kawasan Afrika		Kawasan Amerika	
	Negara	Jumlah	Negara	Jumlah	Negara	Jumlah	Negara	Jumlah
1	Jepang	25	Italia	280	Afrika Selatan	24	Amerika Serikat	1645
2	Philipina	2	Turki	77	Secyhelles	3	Uruguay	1
3	India	49	Swiss	15	Nigeria	3	Chilie	1
4	Singapura	3	Cyprus	88	Mesir	7	Puerto Rico	7
5	Malaysia	35	Spanyol	60	Mauritius	4	Kep Karibia	4
6	UE Arab	63	Yunani	9	Tanzania	2	Bahama	2
7	Selandia Baru	123	Rusia	17	Tunisia	2	Brazil	2
8	Macau	1	Belanda	1	Zanzibar	1	Jumlah	1789
9	Bahrain	2	Malta	5	Jumlah	46		
10	Kep Palau	3	Jerman	3				
11	Australia	2	Bulgaria	4				
12	Qatar	24	Inggris	20				
13	Maldives	57	Jumlah	579				
14	Hongkong	2						
15	Sri Lanka	6						
16	China (RRC)	13						
17	Thailand	1						
18	Oman	2						
	Jumlah	413						

Sumber: BP3TKI Denpasar (Maret 2011)